Abstraksi

Dalam penelitian ini membahas tentang studi implementasi yang menggunakan pendekatan teori dari Merilee S. Grindle. Dalam teorinya Grindle menjelaskan antara konten dan konteks kebijakan yang dapat menjawab permasalahan tentang penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini menyangkut tentang seperti apa kebijakan yang ada ditingkat kota, bagaimana aktor-aktor dalam menjalankan PRONA dan realitas perspektual masyarakat tentang adanya PRONA ini.Pendaftaran tanah di Indonesia khususnya di Surabaya perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Terutama Surabaya merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Hadirnya PRONA (Progam Nasional Agraria) sebagai salah satu proogam yang dilakukan oleh pemerintah agar pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia segera selesai. Dalam segi peraturan kebijakannya PRONA sudah memiliki sejarah yang cukup panjang. Mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria hingga peraturan-peraturan mentri yang menunjang terlaksananya PRONA. Ditingkat provinsi dan kota/kabupaten peraturan-peraturan tersebut di implementasikan dalam bentuk surat-surat keputusan yang berisi tentang penunjukan aktor-aktor yang akan membantu mengerjakan kebijakan tersebut. PRONA yang sedang berjalan tidak lepas dengan adanya pihak-pihak yang membantu. Selain petugas BPN itu sendiri, pihak pemerintahan yang ikut berkoordinasi membantu terlaksananya PRONA seperti petugas kelurahan, RT/RW dan bahkan ada pihak ke-tiga yang ikut membantu dalam terlaksananya PRONA ini. Masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum atas hak tanah yang mereka miliki terbantu dengan adanya PRONA ini. Disamping karena biayanya murah, waktu yang diperlukan juga relatif singkat daripada mengurus sertifikat dengan melalui jalur normal. Dan hal ini dijadikan kesempatan untuk Pihak ke-tiga untuk mengambil keuntungan dengan menyediakan jasa kepengurusan sertifikat melalui PRONA.

Kata Kunci : **Implementasi kebijakan, PRONA, Sertifikasi tanah masal**

ABSTRACT

In this study discuss about implementation studies that use the theory approach from Merilee S. Grindle. In his theory Grindle describes the content and policy contexts that can address the problems of this research. The problem in this research concerns about what kind of policy is at city level, how the actors in running PRONA and the reality of society perspective about existence of this PRONA.Land Registrations in Indonesia, particularly in Surabaya, need more attentions. Especially because Surabaya is considered to be one of the biggest city in Indonesia. As a response to that problem, PRONA (Program Nasional Agraria) has now emerged as a government program as a solution to accelerate the land registration process in Indonesia. PRONA's policy regulations, has a long history. From the Principle of Agricultural Constitutions or *Undang-Undang Pokok Agraria*, to ministerial regulations to support the implementations of PRONA. In Provincial and city or district level, those regulations are implemented in the form of a decree that include the appointment of the functionaries in charge of prosecuting the policy.PRONA, that currently takes place, cannot be separated from all the supporting parties. Beside the officers from BPN itself, there are other government parties that ensure the success of PRONA, such as the village administrator, *RT/RW* and even third parties that helps securing the success of this program. Public needs legal certainty regarding their rights when it comes to land registrations, and PRONA help to ensure this happens. Not only it is inexpensive, but it takes shorter time compare to regular land registrations process. Third parties has seen this opportunity to make a profit by providing certificate handling services trough PRONA.

Keywords: **Policy implementation, PRONA, Mass land registration**